

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi epidemiologi berupa peralihan pola penyakit telah berlangsung di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Transisi ini merujuk pada peralihan dari dominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular¹. PTM telah menjadi isu kesehatan yang mendapatkan perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun global. Menurut data WHO tahun 2023, penyakit tidak menular telah mengakibatkan lebih dari 41 juta kematian setiap tahunnya, atau 74% dari total kematian di seluruh dunia. Sebanyak 86% kematian dini pada umur kurang dari 70 tahun akibat PTM terjadi pada negara dengan pendapatan rendah dan menengah, sedangkan pada negara maju PTM menjadi penyebab kematian sebesar 14%².

Diabetes Melitus (DM) menjadi salah satu penyakit tidak menular yang termasuk dalam fenomena transisi epidemiologi. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa diabetes ialah gangguan metabolik jangka panjang yang ditandai oleh glukosa darah yang tinggi dan jika tidak ditangani dapat mengakibatkan kerusakan parah pada kardiovaskular, sistem vaskular, retina, ginjal, dan sistem saraf dalam jangka panjang³. Diabetes terjadi karena pankreas gagal menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh tidak mampu memanfaatkan insulin dengan baik. Insulin ialah hormon yang berperan mengelola kadar glukosa dalam darah. Apabila diabetes tidak terkelola dengan baik, efek jangka panjangnya dapat merusak beragam sistem pada tubuh, khususnya saraf serta sistem vaskular dan disebut peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia⁴.

Penderita DM berisiko lebih besar untuk mengalami berbagai permasalahan kesehatan serius dan mengalami infeksi. Penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, kebutaan, amputasi tungkai bawah, dan komplikasi kehamilan, juga merupakan dampak dari diabetes di sebagian besar negara dengan pendapatan tinggi⁵. Dampak lain dari kejadian diabetes adalah menyebabkan tekanan ekonomi yang signifikan pada negara, sistem kesehatan, penderita diabetes, dan keluarga penderita DM. Di Indonesia, diabetes masih menjadi perhatian dikarenakan beban biaya yang harus

dikeluarkan oleh jaminan kesehatan yang tinggi. Menteri Kesehatan RI pada tahun 2017 menyatakan bahwa sejak tahun 2014, sekitar 30% pengeluaran BPJS digunakan untuk pengobatan penyakit kronis termasuk diabetes melitus⁶. BPJS kesehatan menyebutkan terjadi peningkatan total klaim peserta BPJS kesehatan penyandang diabetes dari Rp 4,9 Triliun tahun 2018 menjadi Rp 6,4 Triliun tahun 2022. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka total pembiayaan penanganan diabetes di tahun 2045 diprediksi dapat mencapai angka Rp 23,59 triliun⁷.

Diabetes merupakan salah satu isu kesehatan yang berskala global dengan pertumbuhan tercepat di abad ke-21⁸. Menurut informasi dari *International Diabetes Federation* (IDF), prevalensi diabetes di dunia tahun 2021 pada penduduk umur 20-79 tahun menginjak angka 10,5% atau sekitar 537 juta orang di dunia mengidap diabetes, dimana sebanyak 10,2% diabetes menyerang wanita dan 10,8% diabetes menyerang laki-laki dari total penduduk dengan umur yang sama. Jumlah total diabetes diperkirakan akan semakin meningkat menjadi 643 juta atau setara dengan prevalensi sebesar 11,3% pada tahun 2030 dan menjadi 783 juta atau setara dengan prevalensi sebesar 12,2% pada tahun 2045⁹. Sementara itu, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Indonesia tercatat sebanyak 2,2%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,2% dibandingkan tahun 2018, di mana prevalensi pada kelompok usia yang sama adalah 2%^{10,11}.

Salah satu bagian dari kelompok pekerjaan usia produktif adalah pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah merupakan pekerja yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan prevalensi DM pada pegawai pemerintah perlu mendapat perhatian serius karena akan berdampak pada produktivitas dan kinerja pegawai di tempat kerja¹². *International Diabetes Federation* mencatat sekitar sepertiga atau 32,6% dari total kematian akibat diabetes terjadi pada individu dalam usia produktif (<60 tahun). Hal ini setara dengan 11,8% dari total kematian global pada orang-orang berusia di bawah 60 tahun⁹. Jika ditelaah secara global, beberapa studi menunjukkan tingginya prevalensi kejadian DM pada pegawai pemerintah. Di Zona Guji, Wilayah Oromia,

Ethiopia prevalensi kejadian DM pada pegawai pemerintah pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,9%¹³. Sementara itu di daerah Abeokuta Town, Ogun State, Nigeria prevalensi DM pada pegawai pemerintah tahun 2022 adalah sebesar 11,4%¹⁴.

Berdasarkan data SKI tahun 2023, prevalensi diabetes melitus pada pegawai pemerintah di Indonesia menunjukkan angka sebesar 4,1%. Jika dibandingkan tahun 2018, prevalensi DM pada pegawai pemerintah mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1%. Walaupun demikian, pada tahun 2023 pegawai pemerintah masih menjadi kelompok pekerjaan dengan prevalensi DM tertinggi dibandingkan dengan kelompok pekerjaan lainnya¹¹. Sementara itu, di Provinsi Jambi sebanyak 436 pegawai pemerintah tercatat sebagai responden dalam SKI 2023, dengan 12 orang (2,9%) diantaranya terdiagnosis diabetes. Meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, temuan ini tetap menunjukkan bahwa diabetes merupakan masalah kesehatan yang relevan di tingkat daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor risiko yang turut berperan dalam meningkatkan kerentanan pegawai pemerintah terhadap kejadian diabetes melitus.

Faktor risiko diabetes melitus tipe 2 dapat dipahami melalui pendekatan segitiga epidemiologi, yang membagi determinan penyakit ke dalam tiga komponen utama yaitu penjamu (*host*), agen (*agent*), dan lingkungan (*environment*)¹⁵. *Host* meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan. *Agent* meliputi status gizi, aktivitas fisik, hipertensi, konsumsi buah dan sayur, konsumsi makanan manis, konsumsi makanan asin, kesehatan jiwa (stres), dan merokok¹⁶. Sementara itu, *environment* meliputi kondisi sosial ekonomi¹⁷.

Menurut hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diperoleh sejumlah temuan menarik mengenai faktor risiko kejadian diabetes melitus, khususnya di kalangan pegawai pemerintah. Studi yang dilaksanakan oleh Tambunan, Ruth menyebutkan adanya hubungan antara usia, jenis kelamin, hipertensi, konsumsi alkohol, status merokok, dan stres dengan kejadian diabetes melitus pada pegawai pemerintahan di Indonesia tahun 2018¹⁸. Riset yang dilakukan oleh Dea, Angelaberti juga mengemukakan bahwa keturunan, hipertensi, pola makan, aktifitas fisik, dan IMT

memiliki hubungan dengan risiko DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Kota Padang¹⁹.

Pegawai pemerintah yang semuanya termasuk dalam kelompok usia produktif turut berperan dalam membentuk gaya hidup individu, dan berpotensi untuk memperbesar kemungkinan terkena diabetes. Penelitian yang dilakukan oleh Resti, H dan Cahyati, W mengungkapkan bahwa status obesitas berhubungan dengan kejadian DM pada usia produktif²⁰. Riset oleh Handayani, dkk menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki obesitas berisiko 4 kali lipat mengalami DM dibandingkan dengan yang tidak obesitas²¹. Urbanisasi yang pesat telah mengubah pola makan pegawai pemerintah dari makanan tradisional yang padat gizi menjadi makanan olahan tinggi gula dan lemak. Pola kerja yang sedentari, dengan waktu kerja yang panjang dan aktivitas fisik yang semakin menurun serta gaya hidup yang kurang aktif, ditambah terbatasnya kesempatan berolahraga, menciptakan timbulnya obesitas dan menjadi faktor risiko kejadian diabetes melitus²².

Gaya hidup dan pola kerja pegawai pemerintah yang padat sering kali tidak mendukung kesehatan, dan umumnya menjalani rutinitas yang cenderung sedentari atau perilaku kurang gerak, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup²³. Penelitian oleh Nasrulsyah, C mengungkapkan hasil survei di Dinas Kesehatan Aceh bahwa hanya 9,3% pegawai pemerintahan yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang minim aktivitas fisik, pola makan yang tidak diimbangi dengan olahraga teratur, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan²⁴.

Riset yang dilakukan oleh Suryani, dkk menyatakan bahwa merokok mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Seseorang dengan kebiasaan merokok lebih dari 20 batang dalam satu hari memiliki risiko DM lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok²⁵. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan risiko komplikasi terkait diabetes seperti penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, kebutaan, memperlambat penyembuhan luka, dan meningkatkan risiko amputasi anggota tubuh bagian bawah sehingga memberikan beban yang signifikan pada sistem kesehatan²⁶.

Stres turut menjadi faktor risiko yang berkontribusi dalam kejadian DM pada pegawai pemerintah. Penelitian oleh Pridani, Primatanti, dan Dewi menyebutkan bahwa stres berhubungan dengan kejadian DM di RSUD Sanjiwani Gianyar²⁷. Berdasarkan ilmu psikologi, stres juga dapat menyebabkan perubahan gaya hidup, seperti meningkatnya konsumsi camilan tinggi gula²⁸. Kondisi stres dapat memicu produksi kortisol berlebih, yaitu hormon yang meningkatkan kadar gula darah dengan melawan efek insulin. Selain itu, kortisol tinggi memicu penambahan berat badan dengan mengaktifkan enzim penyimpan lemak dan merangsang rasa lapar. Pola makan berlebih akibat stres ini tidak hanya berkontribusi pada obesitas, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk diabetes melitus²⁹.

Tingginya angka kejadian DM di kalangan pegawai pemerintah di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap masalah ini. Berbagai faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian DM pada kelompok ini juga berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit tersebut. Namun, penelitian yang membahas mengenai determinan kejadian DM pada pegawai pemerintah masih terbatas, khususnya terkait faktor risiko paling dominan yang menyebabkan DM pada pegawai pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus pada Pegawai Pemerintah di Indonesia (Analisis Data SKI Tahun 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan prevalensi DM di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan bahwa kejadian ini merupakan permasalahan yang serius dan memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan data SKI, pada tahun 2018 prevalensi DM naik dari 2% menjadi 2,2% pada tahun 2023. Di antara kelompok pekerjaan, pegawai pemerintah memiliki prevalensi DM yang paling tinggi, yaitu sebesar 4,1%.

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat berbagai faktor risiko kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah. Faktor risiko tersebut diantaranya seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, konsumsi makanan manis, konsumsi makanan asin, hipertensi, merokok, status gizi, konsumsi buah dan sayur, aktifitas fisik, kesehatan jiwa (stres), dan sosial ekonomi. Dengan demikian,

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa saja faktor risiko kejadian diabetes melitus tipe 2 pada pegawai pemerintahan di Indonesia berdasarkan data SKI tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor risiko kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia berdasarkan data SKI tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui gambaran DM tipe 2, karakteristik pegawai pemerintah, dan karakteristik pegawai pemerintah penderita DM tipe 2 di Indonesia.
2. Menganalisis hubungan terkait karakteristik individu (usia, jenis kelamin, dan pendidikan) dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
3. Menganalisis hubungan konsumsi makanan manis dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
4. Menganalisis hubungan makanan asin dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
5. Menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
6. Menganalisis hubungan hipertensi dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
7. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
8. Menganalisis hubungan merokok dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
9. Menganalisis hubungan konsumsi buah dan sayur dengan DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
10. Menganalisis hubungan kesehatan jiwa (stres) dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.

11. Menganalisis hubungan sosial ekonomi dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.
12. Menganalisis faktor risiko paling dominan yang berhubungan dengan kejadian DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah manfaat. Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini diantaranya yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memperkaya wawasan di bidang epidemiologi, khususnya mengenai faktor risiko DM tipe 2 pada pegawai pemerintah di Indonesia. Dengan menganalisis data dari SKI 2023, penelitian ini dapat membantu menjelaskan hubungan antara berbagai faktor risiko dengan kejadian DM tipe 2. Hasilnya juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkait topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat, sehingga terdorong untuk menerapkan gaya hidup yang dapat mengurangi risiko terjadinya DM tipe 2.

b. Institusi Kesehatan

Melalui penelitian ini, diharapkan temuan penelitian ini bisa digunakan menjadi referensi dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan serta pengendalian DM tipe 2 yang lebih efektif dan terarah, termasuk pengembangan program deteksi dini dan intervensi gaya hidup sehat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini masyarakat bisa mendapat informasi bermanfaat terkait pentingnya mengenali faktor risiko DM tipe 2 serta dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor risiko diabetes dan mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung penerapan pola hidup sehat untuk mencegah diabetes, khususnya di kalangan pegawai pemerintah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan penelitian ini menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih terfokus dan terperinci. Penelitian ini juga diinginkan bisa memperluas wawasan serta menjadi sarana pengembangan keterampilan penelitian, khususnya mengenai Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus pada Pegawai Pemerintah di Indonesia (Analisis Data SKI Tahun 2023).